



JOURNAL

MAJALAH ILMIAH EKONOMI & BISNIS
FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS Dr. SOETOMO

ISSN: 0854 - 4883

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN
TINGKAT KEMATANGAN KARYAWAN PADA
PT. VINCCINDO ASIA SEPATU SURABAYA

Slamet Riyadi

PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
PADA PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNASIONAL
CALIFORNIA FRIED CHICKEN DI
PAKUWON TRADE CENTER
SURABAYA

Liosten Rianna Ully T

PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN
DENGAN PENDEKATAN ECONOMICS BASE MODEL (EMB) :
STUDY PADA DAERAH TINGKAT II
MADIUN DAN MAGETAN

Firdaus

IKLAN FAKTOR TERPENTING DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBELIAN SABUN MANDI LUX

Sri Utami Ady

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIWASPADAI OLEH
PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM
MENEROBOS PASAR GLOBAL DUNIA

Mohammad Rusman

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME
PENJUALAN BODY SCRUB PADA PT. ROMOS SURABAYA

Sandra Oktaviana Pinaraswati

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG
TERHADAP PRODUKS DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA

Lumadya Adi

Volume XI

No. 2

J U N I

2008

**PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN
DENGAN PENDEKATAN ECONOMICS BASE MODEL (EMB)
(STUDY PADA DAERAH TINGKAT II MADIUN DAN MAGETAN**

Firdaus

Fakultas Ekonomi Universitas Dr Soetomo

Abstract

The concept of the territory economics growth arises other growth concept, such as the basic concept. According to the basic concept, the growth should necessarily be conceived such a way by grouping the economy sectors and groups of commodity into the one which could become the basic growth and the one which could not. So the economy plan accompanying the market economy must group the basic sector or groups of commodity. The sectors categorized as the basic one have to be treated as the basic in the territory development. While, the ones which are not the basic should not be treated excessively, such obtaining the high priority in the development funds. The location is in Kabupaten Dati II Madiun and Magetan by using the three year time series secondary data from 2003-2005. The data are gathered from statistic Office at kabupaten Dati II Madiun and Magetan, Statistic Office Java and Bappeda Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan and the relevant literature with the research. They are analysed quantitatively in accordance with the research aims. To know the descriptions of sectors/groups of commodity which trend to weaken or strengthen, it is used location quotient (LQ) analysis. Then to know the placement rate in each sector having a comparative advantage (basic sector) at Kabupaten Dati II Madiun and Magetan. It is used the analysis of localization coefficient (α). to know the second aim, it is used the analysis of movement coefficient (CR), from the comparison of the first LQ (R-1), which is saying the movement on the location distribution. The result show at Kabupaten Dati II Madiun, that there are three sectors that become the basic ones (having $LQ > 1$), namely agriculture sector ($LQ = 2,339$), trade, hotel and restaurant sector ($LQ = 1,02$), and transportation and communication sector ($LQ = 1,388$). The agriculture one compares the strongest basic sector. These three basic sectors possess a localization coefficient of less than one. It means that the productivity rate accumulates weakly in every basic sectors. There are two of those sectors possessing a positive movement coefficient (CR), namely agriculture sector ($CR = 0,0039$) and transportation and communications sector ($CR = 0,00213$). While, the result show at Kabupaten Dati II Magetan, that there are three sectors that become the basic ones (having $LQ > 1$), namely agriculture sector ($LQ = 2,355$), trade, hotel and restaurant sector ($LQ = 2,88$), and transportation and communication sector ($LQ = 1,387$). The agriculture one compares the strongest basic sector. These three basic sectors possess a localization coefficient of less than one. It means that the productivity rate accumulates weakly in every basic sectors. There are two of those sectors possessing a positive movement coefficient (CR), namely agriculture sector ($CR = 0,0354$) and transportation and communications sector ($CR = 0,01269$).

Key Words : basic sector, location quotient, economics structure, sector movement

Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu wilayah / negara yang dikendalikan oleh pasar, barang-barang dan jasa-jasa dihasilkan oleh individu-individu bagi pemenuhan kebutuhan pasar dan selanjutnya pasarlah yang mendistribusikan kepada konsumen yang secara geografis tersebar luas pada wilayah-wilayah pemukiman. Namun, karena sistem perekonomian pasar adalah suatu sistem perekonomian yang bersifat bersaing, maka sistem ini memperkenalkan suatu mekanisme yang disebut mekanisme seleksi pasar.

Pasar akan menyeleksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan serta mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa yang bermutu baik dan harga yang relatif bersaing akan tetap eksis di pasar dan akan tetap bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya barang-barang dan jasa yang kurang bermutu dengan harga yang kurang bersaing akan tergeser dan cenderung menempati posisi marginal pasar dan selanjutnya dampak yang diberikan pada daerah penghasil adalah multiplier yang rendah bagi pengembangan perekonomian daerah yang bersangkutan secara keseluruhan.

Pearreaux seorang ahli ekonomi regional yang walaupun analisisnya berbeda menghasilkan keunggulan yang tidak jauh berbeda dengan ahli-ahli ekonomi diatas. Menurut Pearreaux, daerah-daerah yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas tidak akan tumbuh dengan kecepatan dan intensitas yang sama; kecepatan dan intensitas pertumbuhan daerah tergantung pada faktor penentu dan faktor pendorong yang dimiliki daerah tersebut.

Konsep pertumbuhan ekonomi daerah yang dikembangkan oleh Pearreaux memunculkan konsep-konsep tentang pertumbuhan daerah yang lain, antara lain adalah konsep teori basis (basic concept). Menurut teori basis pertumbuhan, maka pertumbuhan daerah perlu dikonsepsikan sedemikian rupa yaitu dengan menggolong-golongkan sektor-sektor ekonomi dan kelompok-kelompok komoditi yang dapat menjadi basis pertumbuhan dengan yang tidak menjadi basis. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi yang mendampingi ekonomi pasar harus mampu menggolongkan sektor-sektor atau kelompok-kelompok komoditi basis. Sektor-sektor atau kelompok-kelompok komoditi yang dikategorikan sebagai basis harus diperlakukan sebagai basis dalam pembangunan daerah, sebaliknya yang bukan basis seyogyanya jangan diperlakukan secara berlebihan misalnya mendapat prioritas yang tinggi dalam memperoleh curahan alokasi dana.

Sektor basis yang didukung oleh tersedianya faktor-faktor yang diperlukan dalam proses produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan cenderung mengaktualisasikan suatu surplus produksi dari pengalokasian sumber-sumber ekonomi di daerah itu. Oleh karena itu penelitian dasar perlu dilakukan untuk mencari dan menemukan kategori-kategori sektor-sektor atau kelompok-kelompok komoditi basis dan bukan basis agar perencanaan ekonomi tidak menempatkan alokasi sumber-sumber ekonomi terbatas pada alokasi yang tidak tepat dimana akibat alokasi yang tidak tepat adalah pemborosan, inefisiensi dan inflator sifatnya.

Apabila sektor-sektor ekonomi telah dapat dikategorikan dengan tepat, maka dapat diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang menempati sektor-sektor tersebut menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing kuat. Daerah yang didukung oleh produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing akan memberikan kepada daerah pertumbuhan ekonomi yang memiliki momentum yang semakin lama semakin kuat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor-sektor pembangunan manakah dalam struktur perekonomian wilayah Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan yang memiliki kecenderungan melemah atau menguat ?
2. Sektor-sektor pembangunan manakah yang patut diprioritaskan dan memperoleh curahan dana dalam pembangunan Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan ?

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan Sektoral

Dalam perencanaan pembangunan sektoral biasanya diperlukan data-data dari masing-masing sektor yang digunakan untuk menghitung besarnya pendapatan nasional. Perhitungan tersebut didasarkan atas besarnya nilai tambah (value added) di tiap-tiap sektor. Pendapatan nasional dapat dirincikan menurut sektor-sektor produksi, kemudian ditetapkan sasaran dalam sektor-sektor dan sub sektor-sektor itu berhubungan satu sama lain, maka sasaran dalam tingkat output masing-masing tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan sasaran sektor-sektor lainnya (Kadariah, 2001:31-32).

Perbedaan sektor-sektor tersebut dimaksudkan untuk membimbing perencana dalam menyusun rencana dapat terjadi keseimbangan dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini berdasarkan faham bahwa tujuan rencana yang ideal adalah untuk menghindari adanya kapasitas produksi yang tidak bermanfaat, sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produksi nasional yang berarti memperluas kapasitas sektor-sektor dimana produksi terakhir dihasilkan. Jika tambahan kapasitas produksi sudah diketahui, maka akan dapat dihitung perluasan seluruh kapasitas produksi yang dibutuhkan. Masalahnya masa pembangunan yang dibutuhkan suatu sektor lebih lama dari masa pembangunan yang dibutuhkan dari suatu sektor lainnya. Dalam situasi ini, maka tugas yang harus dilakukan adalah usaha mensinkronkan bagian-bagian dari suatu rencana (Siagian, 1989:58).

Apabila tidak ditetapkan dan dirumuskan kebijaksanaan dasar dan strategi pembangunan, penyusunan rencana menyeluruh (aggregate) dengan kerangka makro rencana dan perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka disusun program investasi dan sasaran-sasaran rencana bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan. Hal ini harus didukung secara serasi dengan kerangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten, serta kebijaksanaan pembangunan yang khusus mendukung pembangunan sektor-sektor tersebut sesuai dengan pilihan yang diambil sewaktu menetapkan kebijakan dasar pembangunan yang merencanakan program investasi dengan tekanan pada sektor pertanian ataupun sektor pengembangan industri atau juga sektor prasarana yang luas (social overhead capital). Yang dimaksudkan dengan investasi sektor prasarana yang luas adalah memberikan perhatian secara lebih efektif kepada usaha-usaha dibidang sosial yang mendukung kegiatan produktif seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, penelitian dan kegiatan yang lain (Bintaro Tjokro Amidjojo, 2001 : 186). Program investasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai susunan-susunan rencana masing-masing bidang atau sektor tersebut. Sudah barang tentu harus dipertimbangkan kemungkinan pencapaiannya, skala prioritas yang tajam menunjang pertumbuhan serta hubungan yang serasi dan saling mendukung.

Program atau rencana investasi masing-masing bidang atau sektor terdiri dari berbagai program pembangunan, yang terdiri dari proyek-proyek pembangunan pembangunan yang

merupakan unit terkecil dan aktivitas-aktivitas investasi yang harus diperhitungkan dalam proses perencanaan. Penyusunan secara teliti dikaitkan dengan penetapan sasaran-sasaran (target setting) dari pada rencana bidang atau sektor. (Bintora Tjokro Amidjojo, 2001 : 108). Dalam setiap rencana pembangunan harus ditentukan sektor-sektor mana yang strategis dan sekaligus ditentukan target-target produksi.

Target-target produksi ini yang dipakai sebagai pedoman untuk seleksi proyek. Dengan demikian proyek-proyek yang dipilih akan selalu sesuai dengan prioritas nasional. Pembangunan masing-masing sektor pembangunan perlu pula diperkirakan, disamping perkiraan laju pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan. Bahkan sering pula dilakukan penekanan disatu sektor tertentu daripada sektor lain, karena diinginkan/direncanakan suatu perubahan struktur ekonomi.

Hal ini diusahakan dengan meningkatkan laju pertumbuhan sektor tertentu dan secara relatif pengurangannya pada sektor yang lain, seperti perencanaan untuk mendapatkan keseimbangan antara sektor pertanian untuk mendapatkan keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri.

Disini perlu dipertimbangkan "trade off" (saling meniadakan) yang berarti keuntungan penekanan disatu sektor mungkin akan merugikan sektor lainnya. Hal ini menyangkut juga penekanan dilakukan pada sektor ekonomi ataupun pada sektor non ekonomi. Jika diambil kombinasinya, maka harus dicari keseimbangannya yang serasi dan saling menunjang. (Bintora Tjokro Amidjojo, 2001:106-107).

Sektor-sektor dalam perekonomian mempunyai laju pertumbuhan yang berbeda-beda, karena itu proses pembangunan ekonomi membawa serta perubahan struktur ekonomi. Umpamanya sektor pertanian: tidak bisa berkembang dengan cepat karena terdapatnya permintaan terhadap hasil sektor pertanian naiknya lambat, produktivitas perjamnya rendah, tingkat hidup petani yang rendah yang terdapatnya pangangguran tak kentara. Untuk menaikkan pendapatan nasional dengan cepat diparlukan pergeseran sumber-sumber dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang bisa berkembang dengan cepat (Siagian, 1988:57)

Hubungan antara sektor pertanian dan sektor pertanian terbatas sekali. Dibanyak negara, bukan merupakan pasar bagi sektor industri dan sebaliknya. industri menghisap sebagian besar dari sektor pertanian. Modal kawira-swastaaan tidak mudah mengalir atau bergeser dari suatu sektor ke sektor yang lain. Sehingga pangkal tolak bagi perencanaan pembangunan sektoral dapat dianggap sebagai tertentu (given) dengan adanya kenaikan penduduk disektor pertanian. Berdasarkan hal itu diadakan perkiraan (estimate) tentang keperluan untuk manghisap kenaikan penduduk disektor pertanian ke sektor industri.

Dengan demikian pembangunan akan membawa serta perubahan ke dalam struktur perekonomian, artinya sektor industri secara relatif peranannya akan menjadi lebih besar. Oleh karenanya alternatif yang dipakai agar sektor pertanian tetap memproduksi bahan mentah bagi industri. keseimbangan permintaan dan penawaran hasil pertanian perlu dipertahankan dalam perencanaan. Sedangkan dalam proses Industrialisasi, sektor industri mempunyai fungsi untuk memproduksi keperluan konsumsi masa sekarang dan sektor pertanian maupun sektor industri, serta memproduksi untuk keperluan investasi dan memproduksi barang-barang modal, juga, untuk kedua sektor tersebut. Dengan adanya industri, prasarana-prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mengurangi kelebihan kapasitas prasarana-prasarana yang ada sebelumnya, seperti pemanfaatan listrik, jalan-jalan, jembatan-jembatan, jaringan pengangkutan dan sebagainya (Kadariah, 2001:13-14).

Perencanaan Regional

Perhitungan Pendapatan Regional (Regional Income Account)

Gambaran komprehensif tentang struktur ekonomi daerah penting bagi perencanaan regional. Salah satu pendekatan yang mungkin dengan melalui "regional account" atau akun regional. Akun atau perhitungan tersebut mirip dengan akun nasional yang secara tradisional memakai sistem "treble entry" dimana, pendapatan = pengeluaran = output.

Me Crone percaya, bahwa pengembangan akun pada tingkat regional adalah prasyarat yang esensial sebelum perencanaan regional dilaksanakan. Tetapi terlebih potensinya dalam perencanaan regional, termasuk persoalan-persoalan data dan konseptual dalam penyusunannya.

Selain memberikan gambaran terperinci tentang saling hubungan antara sektor-sektor penting perekonomian regional, akun regional juga menjadi landasan yang bermanfaat bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan-keputusan regional. Dengan tersedianya informasi penting tentang pendapatan output, investasi dan produktivitas regional, maka kebijakan regional tidak lagi bertumpu hanya pada argumen-argumen politik, sosial dan kriteria ekonomi yang tidak tegas dan pengangguran. Taksiran produk regional menurut sektoral memudahkan pemisahan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam perekonomian regional, sedangkan data mengenai prioritas regional memberi petunjuk sektor mana yang patut dikembangkan dimasa yang akan datang. Secara konseptual, daerah bukanlah bangsa/negara dalam ukuran mikro dan memerlukan bentuk yang berbeda dengan akun nasional. Selain itu, struktur ekonomi di tiap daerah mempunyai perbedaan-perbedaan. Sedangkan untuk tujuan perbandingan antar daerah, akun regional harus digunakan. Hal mana dapat mengembangkan aspek-aspek penting dari perekonomian suatu daerah tertentu dibandingkan perekonomian nasional. Daerah merupakan perekonomian terbuka dimana banyak terdapat transaksi-transaksi tanpa rintangan perdagangan, maka tidak banyak informasi tentang arus-arus transaksi tersebut. Misalnya, mengembangkan hasil pendekatan pendapatan dan pengeluaran pada tingkat regional adalah sulit, karena banyak kemungkinan seorang yang bekerja di suatu daerah tertentu tetapi bertempat tinggal di daerah lain (John Glasson, 1988:52-53)

Persoalan-persoalan khusus mengenai data mencakup semua persoalan tentang statistik regional kurangnya frekwensi beberapa seri tenggang waktu publikasi data dan non komparabilitas antar waktu maupun antar ruang. Data statistik dan penelitian sangat diperlukan dan menentukan mutu dari perencanaan. Sering perencanaan tidak dapat dilakukan secara baik karena kurang atau lemahnya data statistik dan penelitian. Data statistik digunakan untuk : pertama, menilai dan mengetahui keadaan pada saat titik-tolak pelaksanaan rencana, kedua, menyusun perkiraan dan proyeksi dimasa depan untuk pelaku rencana. Ketiga, data statistik bersamaan dengan data penelitian yang amat diperlukan untuk perencanaan. Baik perencanaan sektoral maupun perencanaan proyek-proyek. Keempat, dengan data statistik dapat diketahui dan dinilai perkembangan pelaksanaan rencana. (Bintoro Tjokro Amudjaja, 2001: 144)

Meskipun banyak persoalan yang dihadapi tetapi tetap ada usaha untuk membuat akun atau perhitungan regional seperti taksiran PDRB, pengeluaran domestik dan pendapatan pergea-rangan. Disamping itu data tentang tingkat tabungan, investasi, tenaga kerja dan sebagainya dapat memberi gambaran tentang struktur perekonomian daerah. Data itu dipakai dalam perkiraan tingkat kenaikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Jika hal itu data PDRB dikaitkan dengan data tentang penduduk dan pertumbuhannya, maka dapat diperkirakan kenaikan pendapatan perkapitanya. Data statistik pendapatan regional didapat dari data-data pendapatan regional menurut sektor, yaitu sumbangan masing-masing sektor ekonomi.

Secara teknis dengan perhitungan pendapatan regional, informasi tentang potensi dan struktur ekonomi daerah, serta perbandingan relatif antara sektor-sektor ekonomi daerah termasuk pertumbuhannya bisa diketahui secara cermat. (Sri Edi Swasono, 1972:7)

Pembangunan sektor-sektor sama dengan tingkat nasional dan masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub sektor. Sektor-sektor atau sub-sub sektor tersebut dihitung sendiri-sendiri dengan cara memperhitungkan besar nilai tambah (value added) di tiap-tiap sektor atau sub sektor. Pendapatan regional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam perekonomian dalam satu tahun. Cara-cara atau pendekatannya antara lain : produksi, pengeluaran, pendapatan dan alokasi cara produksi dihitung dari nilai produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi disuatu negara atau daerah. Cara pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli dalam masyarakat (rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri) yang dihitung hanya meliputi nilai hasil barang Jadi (final goods) saja. Cara pendapatan dihitung dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (Ace Partadiredja, 2000: 33-34)

Cara alokasi ialah dengan mengetahui dari hasil bagi dari pendapatan nasional menjadi pendapatan regional, dengan indikator ratio tertentu. Tetapi dari cara-cara perhitungan ini perlu dihindari "double counting" atau perhitungan ganda yaitu menghitung suatu nilai barang yang diciptakan ke dalam perekonomian regional sebanyak dua atau beberapa kali.

Dalam menentukan pendapatan daerah atau regional kita mengenal beberapa model : pertama, teori basis ekspor yang menyederhanakan suatu sistem daerah menjadi dua bagian yakni daerah tersebut dan daerah selebihnya, asumsinya ekspor merupakan satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran. Semua komponen pengeluaran lain dianggap sebagai fungsi pendapatan. Sedangkan fungsi pengeluaran dan fungsi ekspor diasumsikan tidak mempunyai intercept, tetapi melalui titik awal 0. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut :

$$Y_1 = (E_i - M_i) + X_i, \text{ artinya pendapatan} \\ = \text{pengeluaran domestic} + \text{ekspor}$$

$$\text{Dengan pengganda } k \text{ yang besarnya} = \frac{1}{1 - (l_i - m_i)}$$

$$\text{Dimana } l_i - m_i < 1$$

Kelemahan model ini, bahwa besar basis ekspor merupakan kebalikan dari besar daerah. Setiap nilai multiplier seakan-akan selalu diperoleh dengan mengubah skala daerah yang menjadi object study. Kenyataannya angka pengganda lebih besar dari daerah-daerah yang besar. Kedua, model pendapatan inter regional yang merupakan pengembangan dari teori basis ekspor karena ekspor bukan lagi dianggap sebagai satu-satunya pengeluaran yang otonomi, dengan perumusan =

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + X_i - H_i$$

artinya pendapatan = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + ekspor - Import

$$\text{Dengan angka pengganda } k \text{ yaitu } \frac{1}{1 - (C_i - \sum M_{ij})(1 - t_j)} \quad j = 1$$

Kebaikan model ini mampu menjelaskan mengapa, pemerintah barangkali harus mengurangi pengeluarannya di beberapa daerah untuk menaikkan pendapatan semua daerah. Dalam keadaan tertentu juga dapat membantu menyalurkan kepentingan nasional dan regional. (Herry W. Richardson, 1975 : 9 -18), Ketiga, teori basis ekonomi yang mengindikasikan pendapatan basis model ini membagi daerah-daerah ke dalam kategori basis, berdasarkan metode :

- a. Metode langsung : dengan mengadakan survei standar dan kuesioner, tetapi cara ini banyak memakan waktu dan biaya
- b. Metode tak langsung : dengan memakai metode IQ yang membagi sektor-sektor ke dalam kategori basis dan non basis. Kebaikannya ialah memperhitungkan ekspor langsung atau tidak langsung (barang antara), tidak mahal dan dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend. (Wan Usman, 2000: 7 - 11)

Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Regional

Tujuan pembangunan, termasuk pembangunan regional merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai keadaan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan tertentu dimasa mendatang. Tujuan-tujuan pembangunan dirumuskan dalam bentuk yang lebih terperinci untuk menentukan target-target yang akan dicapai pada beberapa tahun mendatang. Tujuan-tujuan ini merupakan dasar dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber-sumber daya yang dari sebelum itu menetapkan tujuan-tujuan pembangunan, barulah dapat ditetapkan kebijaksanaan pembangunan yang harus diambil oleh suatu daerah.

Terbatasnya kemampuan daerah untuk membangun menyebabkan daerah tersebut tidak dapat mengatasi semua masalah yang ada, seperti masalah sosial, politik dan ekonomi yang timbul akibat adanya pembangunan daerah yang tidak seimbang. Dengan demikian perlu dibuat suatu skala prioritas dari tujuan-tujuan pembangunan daerah untuk menentukan sampai dimana tujuan-tujuan dicapai dimasa mendatang. Tetapi dalam praktek sulit untuk menyatakan suatu kebijaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik tersebut. Oleh karenanya perlu suatu pertimbangan dasar dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan tersebut. (Sadano Sukirno, 1985: 60 - 61)

Kebijaksanaan dasar ini harus dilandasi dengan pengetahuan atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat termasuk potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya.

Disamping mempertimbangkan masalah-masalah pikiran diantara berbagai alternatif yang fundamental. Alternatif-alternatif tersebut antara lain seperti meningkatkan potensi alokasi investasi sektor pembangunan ekonomi mengurangi imigrasi, mempertahankan ekologi lingkungan, mempertinggi efisiensi berbagai kegiatan perekonomian dan sebagainya. Barangkali dalam jangka panjang tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai tanpa adanya usaha (effort) secara sadar. Namun jika dilihat dari segi politis, sosial dan ekonomis, lebih baik kalau tujuan-tujuan tersebut dicapai dalam jangka pendek atau menengah dengan campur tangan dari pemerintah.

Sadar akan adanya tujuan-tujuan tersebut maka satu daerah memerlukan dorongan atau rangsangan dalam membangun sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Dorongan atau rangsangan itu berupa penyediaan dana, tenaga ahli dan usahawan, prasarana-prasarana institusi keuangan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya secara baik serta mempunyai pengalaman dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunannya. Pembangunan tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip renovasi dan daya tarik unsur yang aktif. Disisi yang pokok adalah adanya permintaan dari serangkaian perkembangan dengan efek multiplier/penganda dan hubungan/kaitan yang dapat diharapkan akan timbul.

Suatu kebijaksanaan perlu dibuat terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan regional harus diselarasakan dengan struktur dasar masing-masing daerah.

Disamping itu peranan external economies cukup besar karena adanya kutub pertumbuhan. Proses polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari "lending sector" mendorong polarisasi dari sektor-sektor ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan.

Kalau polarisasi ini berjalan terlalu lama berdasarkan hanya pada hubungan teknis (polarisasi teknis) yaitu polarisasi yang timbul karena adanya hubungan teknis antara unsur yang aktif dalam kutub pertumbuhan dengan aktivitas ekonomi yang tertarik, maka hal itu akan menyebabkan konjungtur yang lebih besar atau dalam jangka panjang akan terjadi stagnasi di daerah. Oleh karena perlu diadakan diversifikasi dalam berbagai aktivitas sehingga tiap kali muncul-muncul unsur-unsur aktif yang baru.

Banyak peralatan kebijaksanaan pembangunan regional (growth pole) Teori "growth pole" atau pole de crossame" dikemukakan oleh Parroux, merupakan teori dasar dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan daerah yang banyak dijalankan diberbagai negara-negara ini.

Parroux berpendapat bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serempak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah. kemudian pertumbuhan ini menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Jadi pada hakekatnya Parroux menyatakan bahwa ditinjau dari sudut lokasi kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah, Pembangunan ekonomi tidak merata terjadinya diberbagai daerah dan mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada kutub pertumbuhan. Kutub-kutub pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi perkembangan daerah lain yang lebih lambat perkembangan ekonominya. (Wan Usman, 1988:13-14)

Interprestasi geografis dari pada kutub pertumbuhan sesungguhnya lebih banyak merupakan suatu "pole of attraction" Yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat, tanpa adanya interaksi (hubungan) antara usaha-usaha tersebut. Aktivitas-aktivitas ekonomi itu berkembang disuatu tempat (space), maka perkembangan ini menyangkut perkembangan geografis. Kutub pertumbuhan mempunyai potensi perkembangan bagi unsur-unsur ekonomis lainnya yang tidak ada, sehingga dapat menimbulkan permulaan suatu proses perkembangan (Kadariah, 2001: 61)

Penentuan Prioritas Pembangunan Regional

Kutup pertumbuhan tidak akan mampu mengembangkan perekonomian disuatu daerah atau memberikan "spreading effect/trickling down effect" terhadap daerah sekitarnya apabila tidak terdapat suatu keunggulan/keuntungan komparative (*comparative advantage*) yang dimiliki daerah tersebut. Konsep keunggulan komparatif (keunggulan relatif) atau juga biaya relatif diterapkan dalam perekonomian terbuka. Adanya asumsi bahwa perekonomian di daerah-daerah lebih terbuka daripada perekonomian wilayah yang lebih luas dimana daerah-daerah itu berada, terdapat perdagangan antar daerah. Pola produksi masing-masing daerah ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, melainkan juga oleh keunggulan komparatif atau biaya relatif dari masing-masing daerah. Artinya, tiap daerah akan membutuhkan barang-barang dari daerah lain yang mempunyai keunggulan komparatif dalam hasil produksinya atau akan memproduksi barang-barang yang dapat diproduksi dengan biaya harga yang relatif lebih murah daripada daerah lain.

Dalam menentukan keunggulan komparatif ini, terdapat suatu metode yang setidaknya tidaknya dapat membantu para perencana dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan di wilayah tersebut yaitu dengan "location quotient"

Pertama-tama harus ditentukan sembarang sektor-sektor kedalam katagori (misalkan : pertanian, industri pengolahan, pertambangan) dan ke dalam kelompok-kelompok sektor-sektor lokal non basis (misalkan : distribusi, perbankan, pemerintahan, jasa hiburan dan sebagainya). Sering juga metode ini dipakai dengan cara mengakui adanya kelompok sektor campuran, yang kemudian menaksir/menilai komponen basisnya dengan cara lain. Hanya saja cara ini dapat salah. Banyak perusahaan pengolahan, misalnya perusahaan bahan bangunan, percetakan dan lainnya yang melayani kebutuhan lokal dari sektor pengolahannya berorientasi kepada pasar cenderung bertambah dengan semakin bertambahnya luas daerah. (Harry W. Richardson; 1975:20)

Hasil-basil pelayanan sosial serta kegiatan, pemerintah yang tidak dijual ke pasar tetapi melayani kebutuhan lokal dapat dimasukkan kedalam sektor non basis. Sektor-sektor basis meliputi semua aktivitas yang didukung secara ekstra terutama oleh pemerintah. Apabila nilainya lebih dari-satu ($LQ > 1$) merupakan sektor basis dan hal itu memberikan suatu indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif, serta dapat dijadikan "leading sector" Sektor tersebut bisa diprioritaskan dalam pengembangan, pembangunan selanjutnya (Wan Usman; 2000 : 10)

Dasar penggunaan metode ini ialah teori economic base yang maknanya sebagai berikut : karena sektor basis itu menghasilkan barang-barang untuk pasar daerah itu atau diluar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan kedalam daerah. Arus pendapatan itu menyebabkan baik untuk kenaikan konsumen maupun kenaikan investasi di daerah tersebut, yang akhirnya akan menaikkan pendapatan lagi dan kesempatan kerja. Kenaikkan pendapatan didaerah tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basis, melainkan akan menaikkan juga, permintaan terhadap hasil sektor non basis. Permintaan itu pada gilirannya akan menaikkan nilai investasi disektor-sektor tersebut. Dengan kata lain, penanaman modal disektor-sektor lokal merupakan investasi yang induced sebagai akibat kenaikan pendapatan disektor-sektor basis (Siagian, 1988:109)

Berdasarkan gagasan ini, maka sektor-sektor basis ini patut dikembangkan di daerah tersebut. Sebelumnya harus dilakukan penggolongan tiap sektor disuatu daerah ke dalam salah satu dari kedua golongan tersebut. Location Quotient ini mengukur konsentrasi dari pada kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian sub daerah/daerah itu dengan peranan kegiatan ekonomi atau sektor yang sama dalam suatu perekonomian daerah/nasional.

Undang-undang No. 5 tahun 1974 mempunyai langkah yang penting dalam usaha membuat sistim yang jelas dan menyeluruh tentang hubungan tersebut. Isi Undang-undang tersebut antara lain menegaskan pengertian otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam melakukan penyesuaian hubungan tersebut, kita tidak bisa lepas dari konsep negara kesatuan. Dimana tidak akan mungkin terdapat otonomi daerah secara penuh. Kita harus berpedoman pada Undang-undang RI nomer 5 tahun 1979 yang bertitik tolak pada 3 azas, yaitu :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemindahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya, dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya;
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah. Namun perencanaan, pelaksanaan pembiayaan dan kebijaksanaan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat
- c. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban (Biro Hukum dan Humas Sekjen Depdagri, 1998 : 9-10)

Dari ke 3 azas tersebut harus diberikan batasan seberapa jauh wewenang mengelola pembangunan, agar tidak terdapat kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya. Undang-undang tersebut mengharapkan terjadinya kerja sama yang erat antara daerah dan pusat. Hal ini akan mempercepat tercapainya pemerataan, sebab daerah yang memiliki keuntungan komparative tidak akan dapat menikmati sendiri seluruh hasil kekayaan daerahnya. Tetapi akan didistribusikan ke daerah-daerah lainnya. pelaksanaan desentralisasi haruslah disertai koordinasi baik dalam bidang perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pelaksanaan antar dinas dan instansi vertical yang ada di daerah. Amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjelaskan, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dalam pola dasar pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun diarahkan bahwa pembangunan jangka panjang harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi nasional, sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional adalah mempertahankan prestasi sektor pertanian dan mengembangkan kedalaman struktur industri. Pada bagian lain dalam GBHN disebutkan pula mengenai pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu :

- a. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya;
- b. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu dilaksanakan dengan selaras sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah, sedang keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan ;
- c. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih merata diseluruh tanah air, diusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan dalam masing-masing daerah

Apa yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN tersebut menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan pembangunan nasional dan di daerah-daerah. Seperti yang telah disebutkan, bahwa wilayah nasional terlalu luas untuk mengadakan rencana pembangunan yang komprehensif dimana diadakan hubungan yang erat antara rencana sektor satu dengan rencana sektor yang lain atau rencana proyek yang satu dengan proyek yang lain.

Dalam cara pendekatan yang baru ini wilayah perencanaan diperkecil, artinya wilayah nasional dibagi dalam beberapa daerah administratif, misalnya propinsi atau kabupaten, dapat pula satu pulau atau daerah yang menyangkut wilayah yang lebih luas daripada propinsi (Kadariah, 2001: 4-5)

Untuk itu dibentuk lembaga-lembaga perencanaan pemerintahan di Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah yaitu adanya Bappenas dan Bappeda tingkat I maupun tingkat II. Pada dasarnya lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk membantu kepala pemerintah baik ditingkat pusat, daerah maupun ditingkat sub daerah. Berdasarkan Kepres No. 35 tahun 1973, Bappenas adalah lembaga non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bappenas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan nasional serta penilaian atas pelaksanaannya. Bappeda tingkat I dibentuk berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 35 tahun 1930 yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur untuk membantu menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta penilaian atau pelaksanaannya. Sedangkan Bappeda tingkat II adalah staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati / walikota madya kepala daerah tingkat II dan membantu menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di daerah tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan yang memiliki pertumbuhan sektoral relatif tinggi dibandingkan dengan daerah di kabupaten lain di Eks Karesidenan Madiun. Disamping itu kedua kabupaten ini secara geografis terletak di wilayah transit sebelah selatan propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Jawa Tengah sehingga menarik untuk dikaji. Selain itu adanya fasilitas pendukung/prasarana ekonomi yang cukup seperti jalan dan pelabuhan udara (meskipun belum dalam tahap komersial), tempat wisata alam serta potensi daerah yang tinggi seperti sector pertanian, industri, serta sector yang lain dan cukup tersedianya sumber bahan mentah dan tenaga kerja bagi setiap sector merupakan daya tarik tersendiri bagi kedua daerah tersebut untuk dijadikan objek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder secara urut (time series) selama 3 tahun yaitu tahun 2003 – 2005 dengan berbagai penyesuaian Data ini diperoleh dari Kantor Statistik Madiun dan Magetan, Kantor Statistik Jawa Timur dan Bappeda Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan serta dari bahan-bahan media on-line dari kedua wilayah penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian adalah seperti di bawah ini.

1. Perekonomian Kabupaten Dati II Madiun dan Magetani adalah bersifat terbuka, sedangkan sifat perekonomian daerah yang lebih luas (propinsi atau negara) cenderung lebih tertutup.
2. Produktivitas tenaga kerja dan tingkat teknologi di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan dan kawasan yang lebih luas (propinsi dan negara) adalah sama
3. Perilaku-perilaku ekonomi dalam keadaan persaingan, sehingga daerah-daerah dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa berusaha mencari keunggulan komparatif dari daerahnya masing-masing.
4. Pola permintaan setiap daerah dengan pola permintaan daerah yang lebih luas (propinsi atau negara) adalah sama.

Metode Analisa Data

1. Untuk menentukan sector-sector pembangunan yang berkecenderungan melemah atau menguat digunakan metode location quotient (LQ) yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan relatif dengan rumus sebagai berikut :

$$LQ = \frac{R_i}{S/N}$$

dimana :

LQ = Location Quotient sektor I di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan

- S_i = Jumlah nilai tambah sektor I pada PDRB Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan.
 N_i = Jumlah nilai tambah sektor I pada PDRB Propinsi Jawa Timur
 S = Jumlah nilai tambah PDRB seluruh sektor di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan.
 N = Jumlah nilai tambah PDRB seluruh sektor di Propinsi Jawa Timur

Kriteria yang dipakai :

Jika $LQ > 1$, maka menyatakan sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau dikategorikan sebagai sektor basis, yaitu sektor yang diprioritaskan di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan.

Jika $LQ < 1$, maka menyatakan sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atau sektor bukan basis yaitu sektor yang kurang diprioritaskan di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan.

Jika $L = Q$, maka menyatakan sektor tersebut mencukupi kebutuhan (swasembada Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan)

sedangkan untuk mengetahui tingkat pemusatan atau penempatan setiap sektor yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan digunakan koefisien lokalisasi (a) pada perbandingan LQ yang pertama (R_1) dengan rumus sebagai berikut : (Soewardjoko Warpam, 1996 : 83)

$$a = \frac{\text{Hasil Pengurangan Persentase } S_i/N_i \text{ dan } S/N}{100}$$

Dengan Kriteria yang dipakai :

- a = 1. menyatakan terjadi pemusatan/penempatan penuh atau produktivitas sektor terkumpul di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan
2. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang patut diprioritaskan digunakan analisis koefisien pergeseran (CR) dari perbandingan LQ yang pertama (R_i) yang menyatakan pergeseran dalam distribusi lokasinya. (Soewardjoko Warpam, 1996 : 84)

$$CR = \text{Hasil Pengurangan } \% \frac{(S_i/N_{ig} - S_i/N_{ig}) - \% (S/N_g - S/N_g)}{100}$$

Dengan kriteria yang dipakai :

$CR < 0$, berarti sektor tersebut melemah

$CR = 0$, berarti sektor tersebut tidak ada pergeseran. (distribusi tetap)

$CR > 0$, berarti sektor tersebut menguat

$CR = 1$, berarti sektor tersebut terjadi pergeseran mutlak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan

I. Kabupaten Dati II Madiun

A. Letak Geografis

Secara geografis batas Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun adalah : Sebelah barat Kabupaten Dati II Magetan dan Kabupaten Dati II Ngawi, sebelah utara Kabupaten Dati II Nganjuk, Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Dati II Tulungagung dan sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Dati II Ponorogo.

Luas Kabupaten Dati II Madiun adalah 4.482,50 km², dengan letak ketinggian antara 0 - 110 meter di atas permukaan air laut. Keadaan alam Kabupaten Dati II Madiun terdiri dari sebagian kecil pegunungan dan sebagian besar dataran rendah.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus mampu didayagunakan dalam rangka menopang pembangunan daerah. Pemberdayaan penduduk harus mampu menopang pembangunan dalam berbagai sektor pembangunan mulai sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Untuk mendapatkan gambaran keadaan penduduk di Kabupaten Dati II Madiun dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan dapat dilihat dari kepadatan penduduk per wilayah kecamatan dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per wilayah kecamatan. Untuk mengetahui besarnya jumlah penduduk menurut jenis kelamin per wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 : Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dati II Madiun Tahun 2005

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)		Jumlah Penduduk (orang)	Sex Ratio
	Pria	Wanita		
Dolopo	14.485	15.821	29.806	0,98
Kebonsari	19.103	19.357	38.460	0,99
Geger	20.320	21.234	41.554	0,97
Nambangan	19.111	18.634	37.745	1,02
Kare	48.247	37.563	85.810	1,01
Wungu	23.168	23.208	47.394	0,97
Gemarang	29.263	29.335	59.598	0,98
Mejayan	23.540	25.832	49.372	0,94
Madiun	16.391	18.149	24.540	0,94
Wonosari	43.264	40.886	83.150	0,96
Sawah	30.556	31.002	32.558	0,99
Balerejo	15.253	16.617	31.870	0,95
Jiwan	32.071	33.293	66.011	0,97
Saradan	19.724	20.324	40048	0,98
Pilang Kenceng	13.752	14.965	28.717	0,95
JUMLAH	445.887	456.098	901.983	0,97

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Madiun, diolah

Tabel 1 menunjukkan angka sex-ratio, yaitu tingkat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Angka Sex-ratio di Kabupaten Dati II Madiun adalah 0,97 yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk laki-laki sebesar 445.887 dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 456.098

Angka sex ratio sebesar 0,97 dapat diartikan bahwa pada tahun 2005 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini mempengaruhi jenis lapangan kerja yang diperlukan dalam masyarakat dan sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam memprioritaskan jenis lapangan kerja yang disediakan sesuai dengan jenis tenaga kerja yang ada.

C. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Dati II Madiun

Perkembangan produktivitas secara riil pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dati II Madiun tahun 2005 kurang lebih sebesar Rp. 1.634.026 (dalam juta) ada kenaikan kurang lebih 14,12 % dari tahun 2004. Apabila dilihat secara parsial untuk masing-masing sektor ekonomi sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Madiun pada periode tahun 2005 kurang lebih adalah sebagai berikut:

Sektor pertanian sebesar	45,83%
Sektor pertambangan dan penggalian sebesar	0,69%
Sektor industri pengolahan	7,91%
Sektor listrik, gas dan air minum	1,29%
Sektor bangunan	1,87%
Sektor perdagangan, hotel dan restoran	21,78%
Sektor pengangkutan dan komunikasi	14,66%
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,21%

Struktur perekonomian Kabupaten Dati II Madiun jika dilihat dari sector-sector per sector maka sector pertanian memegang peranan yang cukup dominan yaitu sebesar 45,83%. Sedangkan sector perdagangan, hotel dan restoran merupakan sector kedua yang paling dominant menyumbang potensinya ke PDRB Kabupaten Dati II Madiun sebagai wilayah transit di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Sebagai wilayah transit antara propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah maka sudah selayaknya didukung oleh sistem transportasi dan komunikasi yang cukup baik, dimana sector ini menyumbang kurang lebih sekitar 14,66% untuk PDRB Kabupaten Dati II Madiun. Sedangkan sector lain sebagai sector pendukung untuk 3 leading sector pembangunan di Kabupaten Madiun.

D. Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Dati II Madiun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2005 kurang lebih adalah sebesar 4,04%. Laju pertumbuhan sebesar ini didukung oleh berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Dati II Madiun. Sektor pertanian memberikan kontribusi kepada nilai pertumbuhan sebesar 45,83% yang mengalami penurunan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Dati II Madiun tahun 2003 sebesar 0,89%. Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten dati II Madiun memberikan kontribusi sebesar 0,69 %, dimana nilai ini relatif kecil dibandingkan dengan sector-sector yang lain. Nilai sebesar 7,91% disumbangkan oleh sector pengolahan pada PDRB Kabupaten Dati II Madiun pada tahun 2005. Sektor listrik, gas dan air minum memberikan kontribusi sebesar 1,29 % pada nilai PDRB Kabupaten Dati II Madiun. Nilai sebesar ini mengalami penurunan sebesar 0,23 % disbanding dengan periode sebelumnya. Sedangkan keempat sector yang lain yaitu berturut – turut, sector konstruksi, sector perdagangan,hotel dan restoran, kemudian sector pengangkutan dan komunikasi serta sector keuangan, persewaan dan jasa masing-masing memberikan kontribusi, 1,87%, 21,78%, kemudian 14,66% dan yang terakhir 5,21%. Dari keempat sector tersebut sector perdagangan,hotel dan restoran paling besar memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Dati II Madiun.

Untuk peranan sektoral (PDRB) Kabupaten Madiun menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2004-2005 secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 : Peranan Sektoral (PDRB) Kabupaten Dati II Madiun

Menurut Lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2005 (dalam prosentase)

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
Pertanian	48,75	46,04	45,83
Pertambangan dan penggalian	0,69	0,67	0,69
Industri pengolahan	6,20	8,23	7,91
Listrik, gas dan air minum	1,20	1,17	1,29
Konstruksi	1,99	2,45	1,87
Perdagangan, hotel dan restoran	21,51	20,40	21,78
Pengangkutan dan komunikasi	8,51	9,47	14,66
Keuangan, persewaan	4,42	4,71	5,21
Jasa-jasa	6,91	6,86	5,76
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Madiun & Jawa Timur dalam Angka 2005, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pertanian masih mendominasi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Madiun, namun peranan tersebut dari tahun 2003 ke tahun 2005 terus mengalami penurunan. Sektor kedua terbesar sumbangannya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan peranannya dari tahun 2003 ke tahun 2005 sedikit mengalami kenaikan. Sektor ketiga terbesar sumbangannya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan peranannya dari tahun 2003 ke 2005 mendekati nilai ideal yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Dati II Madiun.

E. Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar harga Konstan.

Perkembangan riil Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan indikator terhadap perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Dati II Madiun. Secara total PDRB Kabupaten Madiun tahun 2003 sebesar Rp. 1.311.845,91 (dalam juta), tahun 2004 Rp.1.419.756,79 (dalam juta) dan tahun 2005 Rp.1.634.026,59. Produk Domestik Regional Bruto untuk masing-masing sektor tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 secara terperinci disajikan dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 : PDRB Kabupaten Dati II Madiun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2005 (juta rupiah).

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
Pertanian	639.574,13	641.183,93	682.746,37
Pertambangan dan penggalian	9.061,68	9.378,84	11.899,52
Industri pengolahan	78.931,34	115.555,94	138.948,92
Listrik, gas dan air minum	15.665,41	17.262,65	22.429,49
Konstruksi	26.137,11	34.832,29	32.433,53
Perdagangan, hotel dan restoran	282.097,69	299.218,20	377.239,53
Pengangkutan dan komunikasi	111.582,11	140.926,09	149.955,96
Keuangan, persewaan	58.027,29	63.441,67	90.190,60
Jasa-jasa	90.699,15	98.407,18	90.190,82
Produk Domestik Regional Bruto	1.311.845,91	1.419.756,79	1.634.026,59

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Madiun dan Jawa Timur dalam Angka 2005, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pertanian tumbuh dengan rata-rata 6,2% selama 2 tahun. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh dengan rata-rata 21,25%, sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata 13,45%. Sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh rata-rata 11,67% sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh rata-rata 10,65%, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh rata-rata 14,16%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh rata-rata 13,25%, dan sektor jasa-jasa tumbuh rata-rata 10,26%, serta sektor konstruksi tumbuh rata-rata 10,30%.

2. Kabupaten Dati II Magetan

A. Letak Geografis

Secara geografis batas daerah administratif Kabupaten Dati II Magetan adalah : Sebelah barat Kabupaten Dati II Wonogiri dan Kabupaten Dati II Karanganyar, sebelah utara Kabupaten Dati II Ngawi. Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Madiun dan sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Ponorogo.

Luas Kabupaten Dati II Magetan adalah 6.182,20 km², dengan letak ketinggian antara 0 - 160 meter di atas permukaan air laut. Keadaan alamnya terdiri dari sebagian besar terdiri dari pegunungan dan sebagian kecil wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Untuk wilayah pegunungan sebagian besar merupakan daerah pariwisata yaitu Telaga Sarangan dan sekitarnya. Namun secara umum wilayah Kabupaten Dati II Magetan merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi.

Secara administratif wilayah Kabupaten Dati II Magetan terdiri dari 16 kecamatan, 167 desa dan 18 kelurahan.

Keadaan Penduduk

Penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus mampu didayagunakan dalam rangka menopang pembangunan daerah. Pemberdayaan penduduk harus mampu menopang pembangunan dalam berbagai sektor pembangunan mulai sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Untuk mendapatkan gambaran keadaan penduduk di Kabupaten Dati II Madiun dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan dapat dilihat dari kepadatan penduduk per wilayah kecamatan dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per wilayah kecamatan. Untuk mengetahui besarnya jumlah penduduk menurut jenis kelamin per wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 : Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dati II Magetan Tahun 2005

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)		Jumlah Penduduk (orang)	Sex Ratio
	Pria	Wanita		
Poncol	24.185	25.221	49.806	0,98
Parang	19.203	19.157	38.460	0,99
Lembeyan	10.320	21.134	41.554	0,97
Kawedanan	19.211	18.234	37.745	0,86
Ngariboyo	28.147	27.463	55.810	0,93
Plaosan	23.268	24.108	47.394	0,97
Magetan Kota	29.163	30.535	69.598	0,72
Takeran	23.340	25.332	48.372	0,91
Bendo	17.191	18.549	35.540	0,98
Sukomoro	23.164	20.266	43.150	0,83
Moespati	30.356	31.102	61.558	0,99
Barat	15.153	16.517	31.870	0,95
Kartohardjo	12.171	23.193	35.011	0,97
Karangmojo	19.324	18.224	37-048	0,98
Karas	13.252	14.165	27.717	0,95
Panekan	11.174	12.188	23.442	0,97
JUNLAH	414.326	468.533	882.859	0,93

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Magetan, 2005, diolah

Tabel 4 menunjukkan angka sex-ratio, yaitu tingkat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Angka Sex-ratio di Kabupaten Dati II Magetan adalah 0,96 yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk laki-laki sebesar 414.326 dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 468.533.

Angka sex ratio sebesar 0,88 dapat diartikan bahwa pada tahun 2005 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 88 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini mempengaruhi jenis lapangan kerja yang diperlukan dalam masyarakat dan sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam memprioritaskan jenis lapangan kerja yang disediakan sesuai dengan jenis tenaga kerja yang ada.

C. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magetan

Perkembangan produktivitas secara riil pada produk domestik regional Bruto Kabupaten Magetan tahun 2005 sebesar 1.732.026,10 (dalam juta) ada kenaikan 14,12 % dari tahun 2004. Apabila dilihat secara parsial untuk masing-masing sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

Sektor pertanian sebesar	28,01%
Sektor pertambangan dan penggalian sebesar	7,89%
Sektor industri pengolahan	8,11%
Sektor listrik, gas dan air minum	6,80%
Sektor bangunan	6,20%
Sektor perdagangan, hotel dan restoran	33,59%
Sektor pengangkutan dan komunikasi	4,41%
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,01%

Jika melihat komposisi struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Magetan maka sector pertanian masih cukup dominan disbanding dengan sector yang lain, hal ini memang wajar karena kondisi wilayah geografisnya sangat mendukung sekali, dimana sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan yang cocok untuk daerah pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk wilayah dataran rendah hasil utamanya yaitu padi-padian dan palawija. Sektor utama yang paling dominan di Kabupaten Dati II Magetan yaitu sector perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi pada nilai PDRB secara total sebesar 33,59%. Sektor ini sejak dulu merupakan sector yang paling diprioritaskan oleh Pemda Kabupaten Dati II Magetan, karena daya dukung geografisnya. Keberadaan tempat wisata Telaga Sarangan dan wilayah sekitarnya memberikan andil yang cukup besar dalam mendongkrak nilai PAD Kabupaten Dati II Magetan. Sedangkan sector-sector yang lain memberikan dukungan kepada 2 leading sector tersebut, sehingga dalam jangka panjang Kabupaten Dati II Magetan dapat memprioritaskan sector-sector yang menjadi unggulan, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

B. Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku

Berdasarkan data yang ada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan pada tahun 2005 kurang lebih sekitar sebesar 4,34%. Pertumbuhan sebesar ini dimotori oleh 2 sektor utama yaitu pertanian dan perhotelan, perdagangan dan restoran dengan didukung oleh sector-sector lain seperti listrik, air dan gas, konstruksi serta sector yang lain. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dati II Magetan ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Yang Berlaku pada periode 2003 – 2005 dapat dilihat pada tabel 5. berikut ini,

Tabel 5 : Peranan Sektoral (PDRB) Kabupaten Magetan Menurut Lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2005 (dalam prosentase).

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
Pertanian	26,75	27,04	28,01
Pertambangan dan penggalian	4,69	5,67	7,89
Industri pengolahan	7,20	9,23	8,11
Listrik, gas dan air minum	6,20	7,17	6,80
Konstruksi	6,99	7,45	6,20
Perdagangan, hotel dan restoran	26,51	27,40	33,59
Pengangkutan dan komunikasi	6,51	5,47	4,41
Keuangan, persewaan	1,42	1,71	2,86
Jasa-jasa	2,91	2,86	2,14
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Magetan dan Jawa Timur dalam Angka, 2005, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pertanian masih mendominasi kedua kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Magetan periode 2003-2005 dengan peranan tersebut dari tahun 2003 ke tahun 2005 terus mengalami peningkatan. Sektor pertama terbesar sumbangannya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan peranannya dari tahun 2003 ke tahun 2005 sedikit mengalami kenaikan. Sektor ketiga terbesar sumbangannya adalah sektor listrik, gas dan air minum dan peranannya dari tahun 2003 ke 2005 perubahannya relatif stabil dari tahun ke tahun.

E. Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar harga Konstan.

Perkembangan riil Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan indikator terhadap perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Dati II Magetan. Secara total PDRB Kabupaten Madiun tahun 2003 sebesar Rp. 1.798.968,91 (dalam juta), tahun 2004 Rp.1.895.563,79 (dalam juta) dan tahun 2005 Rp.2.222.211.46. Produk Domestik Regional Bruto untuk masing-masing sektor tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 secara terperinci disajikan dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6 : PDRB Kabupaten Dati II Magetan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2005 (juta rupiah).

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
Pertanian	663.874,73	681.283,13	698.362,58
Pertambangan dan penggalian	11.081,58	11.478,24	12.569,37
Industri pengolahan	200.431,24	215.595,90	352.632,65
Listrik, gas dan air minum	19.765,91	20.162,45	23.653,65
Konstruksi	29.237,81	31.452,39	30.654,32
Perdagangan, hotel dan restoran	689.077,19	742.118,40	763.654,98
Pengangkutan dan komunikasi	132.572,21	144.935,19	149.955,96
Kuangan, persewaan	68.037,49	78.441,67	80.365,63
Jasa-jasa	96.699,25	97.507,28	110.362,32
Produk Domestik Regional Bruto	1.798.968,91	1.895.563,79	2.222.211,46

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Magetan, 2005 diolah

Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa sektor pertanian tumbuh dengan rata-rata 13,36% selama 2 tahun. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh dengan rata-rata 11,25%, sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata 12,45%.

Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh rata-rata 11,44%, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh rata-rata 10,65%, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh rata-rata 14,16%, sektor keuangan, dan persewaan tumbuh rata-rata 13,24%.

Sementara sektor jasa-jasa tumbuh rata-rata 14,26%, serta sektor konstruksi tumbuh rata-rata 18,30%.

Perhitungan dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kabupaten Dati II Madiun

A. Penentuan Prioritas Sektorial Pada Dati II Kabupaten Madiun

Untuk mengetahui prioritas pembangunan di Dati II Kabupaten Madiun digunakan data Produk Domestik Regional Bruto tahun 2005. Dari data tersebut akan dapat diketahui prioritas pembangunan secara sektorial di Kabupaten Dati II Madiun. Data produk Domestik Regional Bruto yang dimaksud adalah penjumlahan dari nilai-nilai tambah (value added) per sektorial atau per sub sektorial selama satu tahun. Data produk Domestik Regional Bruto yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional atas dasar harga berlaku tahun 2005.

Penentuan prioritas pembangunan secara sektoral menggunakan metode location quotient (LQ) yang membandingkan besarnya PDRB Kabupaten Dati II Madiun dengan PDRB Propinsi Jawa Timur. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif (keunggulan relatif) atau yang memiliki $LQ > 1$ adalah sektor basis yaitu sektor yang diprioritaskan di Kabupaten Dati II Madiun.

Location Quotient (LQ) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$LQ = Ri = \frac{Si / Ni}{S / N}$$

Dimana;

Si = nilai tambah sektor di Dati II Kabupaten Madiun

S = nilai tambah seluruh sektor di Dati II Madiun

Ni = nilai tambah sektor di Propinsi Jatim

Perhitungan location quotient (LQ) PDRB sektoral atas dasar harga berlaku di Kabupaten Dati II Madiun disajikan dalam tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 : Perhitungan LQ PDRB Sektoral di Kabupaten Dati II Madiun atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005

No	Lapangan Usaha/Sektor	Si	Ni	Si/Ni	S/N	LQ
1.	Pertanian	693.837.73	11.336.107.58	0.0612060	0.026158	2.339858
2.	Pertambangan dan penggalian	11.899.52	1.211.614.73	0.0098212	0.026158	0.375457
3.	Industri pengolahan	138.948.92	18.770.447.79	0.0074025	0.026158	0.282993
4.	Listrik, gas dan air minum	22.429.49	1.079.318.36	0.0207812	0.026158	0.794448
5.	Konstruksi	32.433.53	4.451.920.12	0.0072853	0.026158	0.278511
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	377.239.53	14.097.366.96	0.0269315	0.026158	1.029571
7.	Pengangkutan dan komunikasi	149.955.96	4.127.897.91	0.0363274	0.026158	10388770
8.	Keuangan, dan persewaan	90.190.60	4.417.418.65	0.0204170	0.026158	0.7802527
9.	Jasa-jasa	117.090.82	6.810.456.08	0.0171928	0.026158	0.657267
Jumlah		1.634.026.3	66.212.568.52			

Sumber data : Hasil perhitungan lampiran I

Dari Tabel 7 di atas diketahui bahwa ada tiga sektor yang menjadi sektor basis (memiliki $LQ \geq 1$) yaitu sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian merupakan sektor basis yang paling kuat. Hal ini ditunjukkan bahwa location quotient (LQ) sektor pertanian di Kabupaten Dati II Madiun yang lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Dalam model economic base suatu sektor yang memiliki $LQ > 1$ berkecenderungan mengekspor produknya ke lain daerah. Sektor ini kuat, karena memang didukung oleh faktor ekonomi yang cukup memadai. Faktor endogement dalam sektor pertanian terutama adalah tanah, irigasi, dan tenaga kerja. Tanah yang subur, irigasi yang baik dan tenaga kerja yang terampil benar-benar faktor endogement yang dapat dicukupi secara lokal di Kabupaten Dati II Madiun. Sektor terkuat kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor terkuat ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

B. Tingkat Konsentrasi Daripada Sektor-sektor yang Memiliki Keunggulan Relatif

Koefisien lokalisasi menyatakan seberapa besar produktivitas bergerak terkumpul disektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif koefisien lokalisasi (a) = 1 berarti produktivitas terkumpul penuh di sektor tersebut. Untuk menentukan koefisien lokalisasi (penempatan) sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif digunakan data PDRB Kabupaten Dati II Madiun dan PDRB Propinsi Jawa Timur berdasarkan harga yang berlaku tahun 2005. Data tersebut dihitung dengan menggunakan metode LQ dari perhitungan (angka banding) yang pertama (RI). Kemudian sektor-sektor yang memiliki keunggulan relatif tersebut dihitung dengan metode koefisien lokalisasi dengan rumus:

$$a = \frac{\text{Hasil pengurangan \% Si/Ni dengan S/N}}{100}$$

Perhitungan koefisien lokalisasi (a) sektoral di Kabupaten Dati II Madiun secara terperinci disajikan dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 : Perhitungan Koefisien Lokalisasi (a) Sektoral Di Kabupaten Dati II Madiun Tahun 2005

No.	Lapangan Usaha/Sektor	(1) Si/Ni	(2) S/N	(3)=(1-2/100 a
1.	Pertanian	0.0612060	2.6158	0.03504799
2.	Pertambangan dan penggalian	0.0098212	2.6158	-0.01633679
3.	Industri pengolahan	0.0074025	2.6158	-0.01875546
4.	Listrik, gas dan air minum	0.0207812	2.6158	-0.00537684
5.	Konstruksi	0.0072853	2.6158	-0.01887271
6.	Perdagangan,hotel dan restoran	0.0269315	2.6158	0.00077351
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0.0363274	2.6158	0.01016944
8.	Keuangan, persewaan dan jasa	0.0204170	2.6158	-0.00574096
9.	Jasa-jasa	0.0171928	2.6158	-0.00896520

Sumber data : Lampiran 2,diolah

Dari Tabel 8 diatas terlihat bahwa sektor-sektor, yang memiliki keunggulan komparatif/sektor basis (memiliki $LQ \geq 1$) memiliki pula koefisien lokalisasi yang jauh dari 1 (satu), hal ini berarti tingkat produktivitas mengumpul secara lemah pada tiap-tiap sektor yang memiliki keunggulan komparatif tersebut (sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi).

C. Tingkat Pergeseran Sektoral dari Sektor-sektor yang Memiliki Keunggulan Komparatif

Koefisien pergeseran sektoral amat berguna untuk mengetahui apakah suatu sektor terutama sektor yang diunggulkan (sektor basis) efisiennya cenderung menguat atau melemah. Secara relatif selama beberapa tahun berjalan. Untuk mengetahui besarnya koefisien pergeseran secara sektoral dipergunakan data dalam bentuk yang sama pada tahun 2003 yang dibandingkan dengan tahun 2005. Koefisien pergeseran dirumuskan sebagai berikut :

$$CR = \frac{\text{Hasil pengurangan \% (Si/Ni95 Si/Ni93) - \% (S/N95 S/N93)}}{100}$$

Hasil perhitungan koefisien pergeseran, sektoral disajikan dalam tabel 9.

Tabel 9 : Koefisien Pergeseran Sektoral di Kabupaten Madiun Tahun 2003-2005

No.	Lapangan Usaha/Sektor	Koefisien Pergeseran (CR)
1.	Pertanian	0.00389
2.	Pertambangan dan penggalian	0.00035
3.	Industri pengolahan	0.00093
4.	Listrik, gas dan air minum	-0.00109
5.	Konstruksi	0.00128
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	-0.25466
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0.00213
8.	Keuangan, dan persewaan	0.00321
9.	Jasa-jasa	0.00140

Sumber data : Lampiran 3, diolah

Dari tabel 9 diatas terlihat bahwa sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif/sektor basis yang memiliki $LQ \geq 1$ (sektor pertanian, sektor perdagangan, Hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi) yang memiliki koefisien pergeseran positif adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi sedangkan sektor basis yang lain yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran memiliki koefisien pergeseran negatif. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses pembangunan berlangsung di Kabupaten Dati II Madiun terjadi peningkatan efisiensi atau terjadi kecenderungan menguatnya struktur ekonomi pada sektor pertanian dan sektor perdagangan dan komunikasi tersebut. Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran terjadi kecenderungan semakin melemah.

2. Kabupaten Dati II Magetan

A. Penentuan Prioritas Sektoral Pada Dati II Kabupaten Magetan

Untuk mengetahui prioritas pembangunan di Dati II Kabupaten Magetan digunakan data Produk Domestik Regional Bruto tahun 2005. Dari data tersebut akan dapat diketahui prioritas pembangunan secara sektoral di Kabupaten Dati II Magetan. Data produk Domestik Regional Bruto yang dimaksud adalah penjumlahan dari nilai-nilai tambah (value added) per sektoral atau per sub sektoral selama satu tahun. Data produk Domestik Regional Bruto yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional atas dasar harga berlaku tahun 2005.

Penentuan prioritas pembangunan secara sektoral menggunakan metode location quotient (LQ) yang membandingkan besarnya PDRB Kabupaten Dati II Magetan dengan PDRB Propinsi Jawa Timur. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif (keunggulan relatif) atau yang memiliki $LQ > 1$ adalah sektor basis yaitu sektor yang diprioritaskan di Kabupaten Dati II Magetan.

Location Quotient (LQ) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = Ri = \frac{Si / Ni}{S / N}$$

Dimana:

Si = nilai tambah sektor di Dati II Kabupaten Magetan

S = nilai tambah seluruh sektor di Dati II Magetan

Ni = nilai tambah sektor di Propinsi Jatim

Perhitungan location quotient (LQ) PDRB sektoral atas dasar harga berlaku di Kabupaten Dati II Magetan disajikan dalam tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Perhitungan LQ PDRB Sektoral di Kabupaten Dati II Magetan atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005

No	Lapangan Usaha/Sektor	Si	Ni	Si/Ni	S/N	LQ
1.	Pertanian	698.362.58	11.336.107.68	0.0612060	0.026158	2.355117
2.	Pertambangan dan penggalian	12.569.37	1.211.614.73	0.0098212	0.026158	0.396592
3.	Industri pengolahan	352.632.65	18.770.447.79	0.0074025	0.026158	0.718197
4.	Listrik, gas dan air minum	23.653.65	1.079.318.36	0.0207812	0.026158	0.837807
5.	Konstruksi	30.654.32	4.451.920.13	0.0072853	0.026158	0.263233
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	763.654.98	14.007.366.96	0.0269315	0.026158	2.084148
7.	Pengangkutan dan komunikasi	149.955.96	4.127.897.91	0.3632274	0.026158	2.884125
8.	Keuangan, dan persewaan	80.365.63	4.417.418.88	0.0204170	0.026158	0.695500
9.	Jasa-jasa	110.362.32	6.810.456.08	0.0171928	0.026158	0.619498
	Jumlah	2.222.211.4	66.212.568.52		0.026158	

Sumber data : Hasil perhitungan lampiran 4, diolah

Dari Tabel 10 di atas diketahui bahwa ada tiga sektor yang menjadi sektor basis (memiliki $LQ \geq 1$) yaitu sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, perhotelan dan restoran merupakan sektor basis yang paling kuat. Hal ini ditunjukkan bahwa location quotient (LQ) sektor pertanian di Kabupaten Dati II Magetan yang lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Dalam model economic base suatu sektor yang memiliki $LQ > 1$ berkecenderungan mengekspor produk/mempunyai pengaruh ke lain daerah. Sektor ini kuat, karena memang didukung oleh faktor ekonomi yang cukup memadai. Faktor endogement dalam sektor perdagangan, perhotelan dan restoran terutama adalah kondisi geografis, tempat wisata, tenaga kerja, industri kerajinan dan banyaknya hotel baik berbintang maupun hotel melalui wisata home stay. Sementara untuk sektor pertanian faktor tanah yang subur, irigasi yang baik dan tenaga kerja yang terampil benar-benar faktor endogement yang dapat dicukupi secara lokal di Kabupaten Dati II Magetan.

B. Tingkat Konsentrasi Daripada Sektor-sektor yang Memiliki Keunggulan Relatif.

Koefisien lokalisasi menyatakan seberapa besar produktivitas bergerak terkumpul disektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif koefisien lokalisasi (α) = 1 berarti produktivitas terkumpul penuh di sektor tersebut. Untuk menentukan koefisien lokalisasi (penempatan) sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif digunakan data PDRB Kabupaten Dati II Magetan dan PDRB Propinsi Jawa Timur berdasarkan harga yang berlaku tahun 2005. Data tersebut dihitung dengan menggunakan metode LQ dari perhitungan (angka banding) yang pertama (RI). Kemudian sektor-sektor yang memiliki keunggulan relatif tersebut dihitung dengan metode koefisien lokalisasi dengan rumus:

$$\alpha = \frac{\text{Hasil pengurangan \% Si/Ni dengan S/N}}{100}$$

Perhitungan koefisien lokalisasi (α) sektoral di Kabupaten Dati II Magetan secara terperinci disajikan dalam tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11 : Perhitungan Koefisien Lokalisasi (α) Sektoral Di Kabupaten Dati II Magetan Tahun 2005

No.	Lapangan Usaha/Sektor	(1) Si/Ni	(2) S/N	(3)=(1-2/100 α)
1.	Pertanian	0.0616051	2.6158	0.03544715
2.	Pertambangan dan penggalian	0.0103741	2.6158	-0.01578394
3.	Industri pengolahan	0.0187866	2.6158	-0.00737141
4.	Listrik, gas dan air minum	0.0219154	2.6158	-0.00424264
5.	Konstruksi	0.0068856	2.6158	-0.01927326
6.	Perdagangan,hotel dan restoran	0.0545181	2.6158	0.04525879
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0.0363274	2.6158	0.01016944
8.	Keuangan, persewaan dan jasa	0.0181929	2.6158	-0.00796511
9.	Jasa-jasa	0.0162048	2.6158	-0.00995316

Sumber data : Perhitungan Lampiran 5

Dari tabel 11 diatas terlihat bahwa sektor-sektor, yang memiliki keunggulan komperatif/sektor basis (memiliki $LQ \geq 1$) memiliki pula koefisien lokalisasi yang jauh dari 1 (satu), hal ini berarti tingkat produktivitas mengumpul secara lemah pada tiap-tiap sektor yang memiliki keunggulan komparatif tersebut (sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi).

C. Tingkat Pergeseran Sektoral dari Sektor-sektor yang Memiliki Keunggulan Komparatif

Koefisien pergeseran sektoral amat berguna untuk mengetahui apakah suatu sektor terutama sektor yang diunggulkan (sektor basis) efisiennya cenderung menguat atau melemah. Secara relatif selama beberapa tahun berjalan. Untuk mengetahui besarnya koefisien pergeseran secara sektoral dipergunakan data dalam bentuk yang sama pada tahun 2003 yang dibandingkan dengan tahun 2005. Koefisien pergeseran dirumuskan sebagai berikut :

$$CR = \frac{\text{Hasil pengurangan \% (Si/Ni95 Si/Ni93) - \% (S/N95 S/N93)}}{100}$$

Hasil perhitungan koefisien pergeseran, sektoral disajikan dalam tabel 12.

Tabel 12 : Koefisien Pergeseran Sektoral di Kabupaten Magetan Tahun 2003-2005

No.	Lapangan Usaha/Sektor	Koefisien Pergeseran (CR)
1.	Pertanian	0.00389
2.	Pertambangan dan penggalian	0.00035
3.	Industri pengolahan	0.00093
4.	Listrik, gas dan air minum	-0.00109
5.	Konstruksi	-0.00128
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	-0.25468
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0.00213
8.	Keuangan, persewaan dan jasa	0.00321
9.	Jasa-jasa	0.00140

Sumber data : Lampiran 6

Dari tabel 12 diatas terlihat bahwa sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif/sektor basis yang memiliki $LQ \geq 1$ (sektor pertanian, sektor perdagangan, Hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi) yang memiliki koefisien pergeseran positif adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi sedangkan sektor basis yang lain yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran memiliki koefisien pergeseran negatif. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses pembangunan berlangsung di Kabupaten Dati II Magetan terjadi peningkatan efisiensi atau terjadi kecenderungan menguatnya struktur ekonomi pada sektor pertanian dan sektor perdagangan dan komunikasi tersebut. Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran terjadi kecenderungan semakin melemah. Melemahnya sector perdagangan, perhotelan dan restoran karena kondisi makro bangsa Indonesia serta adanya isu global terkait dengan terorisme dan travel waring terhadap wisatawan dari luar negeri sedikit banyak berpengaruh terhadap sector tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masing-masing sektor di Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan seperti di bawah ini.

Untuk kabupaten Dati II Madiun. Sektor pertanian memiliki LQ lebih besar dari satu ($LQ = 2,339858$) ini berarti bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis yang berkecenderungan mengekspor produknya ke daerah lain, tetapi sektor ini memiliki koefisien lokalisasi lebih kecil dari 1 ($a = 0,03504799$) ini berarti tingkat produktivitas mengumpul secara lemah pada sektor tersebut. Namun sektor pertanian di Kabupaten Dati II Madiun memiliki koefisien pergeseran positif ($CR = 0,00389$) yang berarti bahwa akan cenderung mengalami proses penguatan struktur pada sektor ini. Sektor pertanian di Kabupaten Dati II Madiun merupakan sektor basis yang paling kuat dengan ditunjukkan oleh I.Q yang paling besar di antara sektor-sektor yang lain. Sektor basis

terkuat kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan $LQ = 1,388770$ dan koefisien lokalisasi lebih kecil dari 1 ($a = 0,01016944$ dengan tingkat koefisien pergeseran sektoral positif ($CR = 0,002213$). Hal ini berarti bahwa tingkat produktivitas mengumpul secara lemah pada sektor ini. Namun sektor ini akan cenderung mengalami proses penguatan selama proses pembangunan berlangsung. Sektor basis terkuat ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan $LQ = 1,029571$ dan koefisien lokalisasi lebih kecil dari 1 ($a = 0,00077351$) serta koefisien pergeseran negatif ($CR = -0,25466$). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas terkumpul secara lemah pada sektor ini dan selama proses pembangunan berlangsung sektor ini cenderung melemah. Sektor yang lain selain ketiga sektor tersebut merupakan sektor bukan basis yang ditunjukkan dengan $IQ < 1$. Hal ini berarti bahwa sektor bukan basis tersebut cenderung mengimport produk-produk sektor tersebut dari daerah lain. Koefisien lokalisasi untuk sektor-sektor bukan basis tersebut semuanya lebih kecil dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas mengumpul secara lemah pada sektor-sektor tersebut. Akan tetapi ada empat sektor bukan basis yang memiliki koefisien pergeseran positif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Hal ini berarti bahwa keempat sektor bukan basis tersebut akan cenderung menguat selama proses pembangunan berlangsung.

Sedangkan untuk kabupaten Dati II Magetan. Sektor perdagangan, perhotelan dan restoran memiliki LQ lebih besar dari satu ($LQ = 2,884184$) ini berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang berkecenderungan mengekspor produknya ke daerah lain, tetapi sektor ini memiliki koefisien lokalisasi lebih kecil dari 1 ($a = 0,01016944$) ini berarti tingkat produktivitas mengumpul secara lemah pada sektor tersebut. Namun sektor pertanian di Kabupaten Dati II Magetan memiliki koefisien pergeseran positif ($CR = 0,00213$) yang berarti bahwa akan cenderung mengalami proses penguatan struktur pada sektor ini. Sektor pertanian di Kabupaten Dati II Magetan merupakan sektor basis yang paling kuat kedua dengan ditunjukkan oleh LQ yang paling besar di antara sektor-sektor yang lain. Sektor basis terkuat kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan $LQ = 2,355117$ dan koefisien lokalisasi lebih kecil dari 1 ($a = 0,03544715$ dengan tingkat koefisien pergeseran sektoral positif ($CR = 0,00389$). Hal ini berarti bahwa tingkat produktivitas mengumpul secara lemah pada sektor ini. Namun sektor ini akan cenderung mengalami proses penguatan selama proses pembangunan berlangsung. Sektor basis terkuat ketiga adalah sektor pengangkutan & komunikasi dengan $LQ = 1,388770$ dan koefisien lokalisasi lebih kecil dari 1 ($a = 0,01016944$) serta koefisien pergeseran negatif ($CR = 0,00213$). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas terkumpul secara lemah pada sektor ini dan selama proses pembangunan berlangsung sektor ini cenderung menguat sebagai sektor yang mendukung sektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Sektor yang lain selain ketiga sektor tersebut merupakan sektor bukan basis yang ditunjukkan dengan $IQ < 1$. Hal ini berarti bahwa sektor bukan basis tersebut cenderung mengimport produk-produk sektor tersebut dari daerah lain. Koefisien lokalisasi untuk sektor-sektor bukan basis tersebut semuanya lebih kecil dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas mengumpul secara lemah pada sektor-sektor tersebut. Akan tetapi ada empat sektor bukan basis yang memiliki koefisien pergeseran positif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Hal ini berarti bahwa keempat sektor bukan basis tersebut akan cenderung menguat selama proses pembangunan berlangsung.

Kebijaksanaan pembangunan untuk Kabupaten Dati II Madiun dan Magetan adalah penekanan prioritas pertama dalam pembangunan dan curahan dananya adalah pada sektor-sektor yang mempunyai indeks $LQ > 1$. Kemudian penekanan prioritas kedua adalah pada sektor-sektor yang mempunyai $LQ < 1$, dimana sektor-sektor ini harus mendapatkan perhatian dalam pembinaan struktur ekonomi wilayah karena walaupun LQ sektor ini kurang dari satu (berarti sektor bukan basis) tetapi memiliki kecenderungan menguat selama proses pembangunan berlangsung ($CR \geq 1$ relatif).

Saran-saran

Hendaknya secara konsisten dan berkesinambungan dalam menentukan prioritas pembangunan secara sektoral perlu dipertimbangkan dengan indikator sektor basis dan sektor bukan basis untuk menentukan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Bagi sektor-sektor yang cenderung tertinggal perkembangannya hendaknya perlu dipertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan perkembangan bagi sektor-sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Glasson, John, *Pengantar Perencanaan Regional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1977
- _____. *In Introduction to Regional Planning*, Katchinson of, 1979
- Gemell, Norman, Chun, *Ekonomi Pembangunan (beberapa Survey)*, LP3ES, Jakarta, 1992
- _____. *Survey in Development Economics*, Oxford Ox4, UK, 1987
- Hall-Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1996*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta 1996.
- _____. *Transformasi Ekonomi Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 1966., Yogyakarta.
- Jhingem, *The Economics of Development And Planning*, Vicas Publishing House, New Delhi 1983.
- _____. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Pres, Jakarta, 1998.
- Kadariah, *Perencanaan Pembangunan Regional*, Prisma No 2. Februari 1977, Jakarta, 1977
- _____. *Ekonomi Perencanaan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Kamaludin, Rushan, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2000.

- Losch, *The Economic of Location*, Yale University Press, New Haven 1994.
- Pinbergen J, *Rencana Pembangunan*, Terjemahan, UI Press, Jakarta 1991
- Partadiredja Ace, *Perhitungan Pendapatan*, Lembaga Penelitian, Pendirian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1975.
- Richardson, *Perkembangan Economics*, Weiden Feld and Nichalson, London 1970.
- _____, Harry W., *Dasar-dasar Ekonomi Regional*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1975.
- Raharjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahan*, Bina Aksara, Jakarta 1983.
- Siagian, *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*, Penerbit Satya Wacana, Semarang, 1989.
- Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Susilo J. P Hendro Pranoto, *Masalah Pembinaan Institutional Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah*, Prisma No. 2 Pebruari, Jakarta 2000.
- Sard W., *Method of Regional Analysis*, MIT Press, London 1999.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2001.
- Todoro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Usman, Wan dan Spillans, James J., *Ekonomi Regional*, Penerbit Kamarunika Universitas Terbuka, Jakarta, 2000
- Waspani, Suwardjoko, *Analisis Kota dan Daerah*, Penerbit Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2000
- Wilton AG, *Models in Urban Planning, Asnoptic, New of The Literature, Urban Studies*, MIT Press, London 1998.